



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 28 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 116 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 99 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Penutup.
- (3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 70 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia seutuhnya, sudah seharusnya memiliki atau berada pada suatu kondisi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu menempatkan manusia sebagai yang utama dalam pembangunan (subyek), dengan implikasi bahwa pemerintah (birokrasi) lebih berperan sebagai fasilitator terhadap adanya peluang dalam membangkitkan kreativitas manusia dan masyarakat guna mewujudkan *Self Sustaining Capacity*, yaitu dengan menerapkan model perencanaan partisipatif (tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Berawal dari perencanaan partisipatif tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan Program Bangga Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa Program Bangga Kencana merupakan urusan wajib. Artinya, bahwa penyelenggaraan Program Bangga Kencana harus dilaksanakan, sekaligus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan

Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana. Sebagai implementasi tugas-tugas tersebut, salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021 berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 28 Juni 2021, Nomor: 050/3938/35.07.202/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 13 Agustus 2021, Nomor: 050/5034/35.07.202/2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021, memuat kebijakan, program dan kegiatan Bangga Kencana Kabupaten Malang Tahun 2021. Proses penyusunan Renja, diawali dengan penghimpunan berbagai usulan masyarakat melalui media Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan. Setiap usulan masyarakat, selanjutnya dijadikan dasar kajian dan diposisikan sebagai prioritas kebijakan dalam perumusan Rencana Kerja Program Bangga Kencana. Sebelum perumusan Rencana Kerja, diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja. Tim tersebut bertugas dalam merumuskan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja, hingga menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2021. Proses penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara bertahap dan intensif melalui media rapat Tim.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021, didasarkan pada: (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021; (3) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021, sekaligus sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD Kabupaten Malang Tahun 2021.

Keberhasilan Program Bangga Kencana mempunyai andil dalam pembangunan sumber daya manusia, yang diwujudkan melalui pembangunan keluarga kecil berkualitas, dengan harapan bahwa setiap keluarga mampu merencanakan kehidupannya agar menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan misi ke-3 RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021, yaitu "Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia".

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Program Bangga Kencana, yaitu masih rendahnya kualitas ber-KB, masih tingginya perkawinan usia di bawah 20 tahun, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana, dan masih lemahnya pembinaan ketahanan keluarga. Guna menjawab permasalahan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berupaya untuk mengatasinya, yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya eksisting secara optimal, dengan berdasarkan prinsip efektif, efisien dan berkelanjutan (*Sustainable*), diikuti dengan peningkatan kemudahan akses program, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.

Namun perlu disadari, bahwa jejaring operasional lini lapangan pada kenyataannya belum mampu mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan Program Bangga Kencana secara menyeluruh. Menyikapi kondisi tersebut, perlu dilakukan penguatan jejaringan pelayanan KB, dengan melibatkan unsur eksekutif, legislatif, Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM), TNI, POLRI, PKK, profesi dan komponen masyarakat sebagai wujud pendekatan Program Bangga Kencana di berbagai segmen sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 28 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 116 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 99 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, serta analisa capaian kinerja Tahun 2019. Pada sisi lain, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 juga memuat program dan kegiatan Tahun 2021, sekaligus memuat sasaran yang ingin dicapai Tahun 2021 (sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021).

1.3.1 Maksud

1. Menjabarkan isu-isu strategis, yang diperkirakan akan berdampak pada penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana.
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KB berkualitas, yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas Program Bangga Kencana Tahun 2021.
3. Mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya, yang akan dijadikan sebagai kekuatan dalam Program Bangga Kencana.
4. Memberikan pedoman, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana.

1.3.2 Tujuan

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi Program Bangga Kencana antara pemerintah pusat dan daerah, antar waktu maupun antar program.
2. Terjalannya keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan Program Bangga Kencana, guna tercapainya sasaran lima tahun ke depan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang didasarkan pada kemampuan dan prioritas pembangunan.
3. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2021.
4. Tersedianya acuan pelaksanaan bagi para pelaksana dan pengelola Program Bangga Kencana di Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Pengadaan Mebel.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengendalian Penduduk.
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK).
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota .
 - 1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
 - 2) Pemetaan Kependudukan;
 - 3) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
 - 4) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - 2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK;
 - 3) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 - 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

- 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- 1) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - 2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - 2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - 4) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - 5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Tabel 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					59.230.428.075,00		41.769.183.207,00		23.042.668.083,84		3.224.666.473,00	50,26	13,99		44.993.849.680,00	123,03	75,96	
1	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	6.490.107.825,00	98.83 %	7.193.776.422,00	100%	7.013.544.483,84	34.7 %	2.657.218.089,00	34,7	37,89	133.53 %	9.850.994.511,00	0	151,78	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%		98.7 %		100%		25.15 %		25,15		123.85 %		0		
			Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100%		100%		100%		0%		0		100%		0		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%		0%		100%		0%		0		0%		0		
			Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%		100%		100%		23.15 %		23,15		123.15 %		0		
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	94.077.750,00	0	92.992.250,00	0	60.098.000,00	0	13.667.700,00	0	22,74	0	106.659.950,00	0	113,37	
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	20 buku	94.077.750,00	16 buku	92.992.250,00	115 buku	60.098.000,00	49 buku	13.667.700,00	42,61	22,74	65 buku	106.659.950,00	325	113,37	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0	1.975.668.000,00	0	3.100.598.435,00	0	6.339.423.353,84	0	2.618.618.889,00	0	41,31	0	5.719.217.324,00	0	289,48	
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	4.261.625.253,84	6 bulan	1.635.931.063,00	50	38,39	6 bulan	1.635.931.063,00	0	0	
	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	60 ob	1.948.439.000,00	526 ob	3.075.994.235,00	80 ob	2.074.641.100,00	38 ob	982.687.826,00	47,5	47,37	564 ob	4.058.682.061,00	940	208,3	
	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	5 buku	14.146.000,00	4 buku	14.192.800,00	7 buku	3.157.000,00	0 buku	0	0	0	4 buku	14.192.800,00	80	100,33	
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	5 buku	13.083.000,00	4 buku	10.411.400,00	0 buku	0	0 buku	0	0	0	4 buku	10.411.400,00	80	79,58	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0	176.084.000,00	0	69.351.500,00	0	95.016.000,00	0	0	0	0	0	69.351.500,00	0	39,39	
	2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	339 stel	103.114.000,00	304 stel	58.491.500,00	157 stel	32.016.000,00	0 stel	0	0	0	304 stel	58.491.500,00	89,68	56,73	
	2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	434 orang	72.970.000,00	79 orang	10.860.000,00	150 orang	63.000.000,00	0 orang	0	0	0	79 orang	10.860.000,00	18,2	14,88	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				0	2.394.685.350,00	0	2.081.756.070,00	0	320.289.130,00	0	3.894.000,00	0	1,22	0	2.085.650.070,00	0	87,09	
2.14.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-															
2.14.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	50 jenis	36.746.000,00	31 jenis	17.655.400,00	5 jenis	5.895.000,00	1 jenis	989.000,00	20	16,78	32 jenis	18.644.400,00	64	50,74	
2.14.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	160 jenis	216.085.000,00	186 jenis	234.830.900,00	53 jenis	240.247.130,00	0 jenis	0	0	0	186 jenis	234.830.900,00	116,25	108,68	
			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	35 jenis	660.893.750,00	28 jenis	633.316.995,00	6 jenis	0	0 jenis	0	0	0	28 jenis	633.316.995,00	80	95,83	
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	13 jenis	152.299.000,00	7 jenis	59.361.500,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	7 jenis	59.361.500,00	53,85	38,98	
2.14.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	30 jenis	123.980.000,00	20 jenis	87.182.500,00	3 jenis	15.860.000,00	0 jenis	0	0	0	20 jenis	87.182.500,00	66,67	70,32	
2.14.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15 jenis	21.700.000,00	10 jenis	13.786.000,00	1 jenis	560.000,00	1 jenis	560.000,00	100	100	11 jenis	14.346.000,00	73,33	66,11	
2.14.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	10792 hok	288.950.000,00	3750 hok	150.975.000,00	385 hok	19.845.000,00	47 hok	2.345.000,00	12,21	11,82	3797 hok	153.320.000,00	35,18	53,06	
2.14.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	778 hok	563.308.500,00	877 hok	275.628.500,00	97 hok	37.882.000,00	0 hok	0	0	0	877 hok	275.628.500,00	112,72	48,93	
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	515 hok	330.723.100,00	600 hok	609.019.275,00	3 hok	0	0 hok	0	0	0	600 hok	609.019.275,00	116,5	184,15	
2.14.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0	90.512.500,00	0	252.987.900,00	0	17.262.000,00	0	16.505.500,00	0	95,62	0	269.493.400,00	0	297,74	
2.14.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 jenis	90.512.500,00	13 jenis	252.987.900,00	2 jenis	17.262.000,00	2 jenis	16.505.500,00	100	95,62	15 jenis	269.493.400,00	150	297,74	
2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0	901.558.450,00	0	576.734.795,00	0	13.200.000,00	0	1.638.000,00	0	12,41	0	578.372.795,00	0	64,15	
2.14.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	19518 buah	96.626.250,00	16242 buah	47.826.250,00	4000 buah	9.000.000,00	1915 buah	1.500.000,00	47,88	16,67	18157 buah	49.326.250,00	93,03	51,05	
2.14.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	60 bulan	116.736.200,00	48 bulan	29.167.269,00	12 bulan	4.200.000,00	6 bulan	138.000,00	50	3,29	54 bulan	29.305.269,00	90	25,1	
			Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (DAK)	48 bulan	688.196.000,00	720 bulan	499.741.276,00	0 bulan	0	0 bulan	0	0	0	720 bulan	499.741.276,00	1.500,00	72,62	
2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0	857.521.775,00	0	1.019.355.472,00	0	168.256.000,00	0	2.894.000,00	0	1,72	0	1.022.249.472,00	0	119,21	
2.14.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	149 unit	323.782.100,00	16 unit	207.551.297,00	163 unit	155.730.000,00	1 unit	1.485.000,00	0,61	0,95	17 unit	209.036.297,00	11,41	64,56	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
2.14.01. 2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (DAK)	33 gedung	476.450.000,00	30 gedung	771.991.000,00	0 gedung		0 gedung		0	0	30 gedung	771.991.000,00	90,91	162,03	
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 gedung	57.289.675,00	1 gedung	39.813.175,00	1 gedung	12.526.000,00	0 gedung	1.409.000,00	0	11,25	1 gedung	41.222.175,00	100	71,95	
2	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100%	8.502.123.600,00	100%	6.985.988.648,00	100%	763.936.700,00	50%	20.349.000,00	50	2,66	150%	7.006.337.648,00	0	82,41	
	2.14.02 .2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	0	2.052.917.750,00	0	1.630.839.563,00	0	169.090.200,00	0	0	0	0	0	1.630.839.563,00	0	79,44	
2.14.02. 2.01.01		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen parameter (Bidang Dalduk)	4 dokumen	2.052.917.750,00	3 dokumen	1.630.839.563,00	1 dokumen	169.090.200,00	0 dokumen		0	0	3 dokumen	1.630.839.563,00	75	79,44	
	2.14.02 .2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	0	6.449.205.850,00	0	5.355.149.085,00	0	594.846.500,00	0	20.349.000,00	0	3,42	0	5.375.498.085,00	0	83,35	
2.14.02. 2.02.02		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah dokumen mutasi keluarga (Bidang Dalduk)	4 dokumen	508.083.100,00	3 dokumen	493.029.400,00	0 dokumen		0 dokumen	20.349.000,00	0	0	3 dokumen	513.378.400,00	75	101,04	
2.14.02. 2.02.04		Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen Pemetaan Kependudukan	0 dokumen Kampung KB	0	0	0	64 dokumen Kampung KB	594.846.500,00	0 dokumen Kampung KB		0	0	0	0	0	0	
2.14.02. 2.02.11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (Bidang Dalduk)	1950 dokumen	5.583.221.250,00	1560 dokumen	3.883.147.485,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	1560 dokumen	3.883.147.485,00	80	69,55	
2.14.02. 2.02.12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen PUS Risti (CONTRA WAR) (Bidang Dalduk)	5 dokumen	155.903.750,00	4 dokumen	701.829.950,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	4 dokumen	701.829.950,00	80	450,17	
			Jumlah dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS) (Bidang Dalduk)	5 dokumen	201.997.750,00	4 dokumen	277.142.250,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	4 dokumen	277.142.250,00	80	137,2	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
3	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB MKJP	40%	33.728.837.650,00	32.21 %	19.612.576.127,00	40%	12.207.297.400,00	31.87 %	487.468.184,00	79,68	3,99	64.08 %	20.100.044.311,00	0	59,59	
			Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	100%		119.08 %		100%		130.92 %		130,92		250%		0		
			Persentase PPKBD Mandiri	69.49 %		61.79 %		69.49 %		34.62 %		49,82		96.41 %		0		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	0	6.253.432.800,00	0	2.884.095.727,00	0	2.662.968.000,00	0	218.940.284,00	0	8,22	0	3.103.036.011,00	0	49,62	
	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik (Bidang PP)	305 orang	5.256.254.000,00	300 orang	1.614.083.127,00	305 orang	12.654.000,00	153 orang	2.628.000,00	50,16	20,77	453 orang	1.616.711.127,00	148,52	30,76	
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	0 ob	0	0 ob	0	2 ob	301.002.000,00	1 ob	7.112.000,00	50	2,36	1 ob	7.112.000,00	0	0	
			Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik (Bidang PP)	0 orang	0	0 orang	0	305 orang	0	153 orang	0	50,16	0	153 orang	0	0	0	
			Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	0 buku	0	0 buku	0	115 buku	0	49 buku	0	42,61	0	49 buku	0	0	0	
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	0 jenis	0	0 jenis	0	7 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR) (Bidang KB)	3800 orang	997.178.800,00	4525 orang	1.270.012.600,00	3800 orang	2.349.312.000,00	4975 orang	209.200.284,00	130,92	8,9	9500 orang	1.479.212.884,00	250	148,34	
			Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (DAK)	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	0	6 bulan	0	50	0	6 bulan	0	0	0	
			Jumlah dokumen mutasi keluarga (Bidang Dalduk)	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	
			Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/keurahan (Bidang Dalduk)	0 dokumen	0	0 dokumen	0	390 dokumen	0	195 dokumen	0	50	0	195 dokumen	0	0	0	
			Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP)	0 orang	0	0 orang	0	271 orang	0	135 orang	0	49,82	0	135 orang	0	0	0	
			Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos	0 tahun	0	0 tahun	0	0 tahun	0	0 tahun	0	0	0	0 tahun	0	0	0	
			Jumlah PPKBD Aktif (Bidang PP)	0 orang	0	0 orang	0	390 orang	0	390 orang	0	100	0	390 orang	0	0	0	
			Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK)	0 kelompok	0	0 kelompok	0	25 kelompok	0	25 kelompok	0	100	0	25 kelompok	0	0	0	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
			Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK)	0 akseptor	0	0 akseptor	0	38866 akseptor	0	40468 akseptor	0	104,12	0	40468 akseptor	0	0	0	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	0	17.707.377.000,00	0	9.664.020.000,00	0	2.006.805.000,00	0	43.870.500,00	0	2,19	0	9.707.890.500,00	0	54,82	
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP)	271 orang	17.707.377.000,00	541 orang	9.664.020.000,00	271 orang	2.006.805.000,00	135 orang	43.870.500,00	49,82	2,19	676 orang	9.707.890.500,00	249,45	54,82	
			Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (Bidang Dalduk)	0 dokumen	0	0 dokumen	0	390 dokumen	0	195 dokumen	0	50	0	195 dokumen	0	0	0	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	0	4.029.202.600,00	0	3.004.741.350,00	0	4.160.718.400,00	0	56.674.400,00	0	1,36	0	3.061.415.750,00	0	75,98	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai (Bidang KB)	96 klinik	2.582.990.900,00	96 klinik	923.590.500,00	96 klinik	247.522.000,00	80 klinik	3.464.000,00	83,33	1,4	176 klinik	927.054.500,00	183,33	35,89	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif (Bidang KB)	343625 akseptor	690.697.700,00	394708 akseptor	1.227.309.950,00	343625 akseptor	2.639.311.200,00	391255 akseptor	53.210.400,00	113,86	2,02	785963 akseptor	1.280.520.350,00	228,73	185,4	
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai (Bidang KB)	0 klinik	0	0 klinik	0	96 klinik	1.254.954.000,00	80 klinik	0	83,33	0	80 klinik	0	0	0	
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (DAK) (jenis)	33 gedung	476.450.000,00	30 gedung	771.991.000,00	31 gedung	0	0 gedung	0	0	0	30 gedung	771.991.000,00	90,91	162,03	
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB) (Bidang KB)	34181 PUS	279.064.000,00	53022 PUS	81.849.900,00	34181 PUS	18.931.200,00	57769 PUS	0	30,99	0	110791 PUS	81.849.900,00	-124,13	29,33	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	0	5.738.825.250,00	0	4.059.719.050,00	0	3.376.806.000,00	0	167.983.000,00	0	4,97	0	4.227.702.050,00	0	73,67	
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos	0 tahun	0	0 tahun	0	1 tahun	1.677.200.000,00	0 tahun	0	0	0	0 tahun	0	0	0	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
2.14.03. 2.04.03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah PPKBD Aktif (Bidang PP)	390 orang	5.738.825.250,00	390 orang	4.059.719.050,00	390 orang	1.699.606.000,00	390 orang	167.983.000,00	100	9,88	390 orang	4.227.702.050,00	100	73,67	
			Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP)	0 orang	0	0 orang	0	271 orang	0	135 orang	0	49,82	0	135 orang	0	0	0	
			Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri (Bidang KKK)	0 kelompok	0	0 kelompok	0	47 kelompok	0	45 kelompok	0	95,74	0	45 kelompok	0	0	0	
4	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase BKR Paripurna	62.26 %	10.509.359.000,00	54.72 %	7.976.842.010,00	62.26 %	3.057.889.500,00	56.6 %	59.631.200,00	90,91	1,95	111.32 %	8.036.473.210,00	0	76,47	
			Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	88.15 %		84.19 %		88.15 %		83.97 %		95,26		168.16 %		0		
			Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	47.47 %		27.88 %		47.47 %		26.47 %		55,76		54.35 %		0		
	2.14.04 .2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	0	10.509.359.000,00	0	7.976.842.010,00	0	3.057.889.500,00	0	59.631.200,00	0	1,95	0	8.036.473.210,00	0	76,47	
	2.14.04. 2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK)	0 akseptor	0	0 akseptor	0	38866 akseptor	280.000.000,00	40468 akseptor	0	104,12	0	40468 akseptor	0	0	0	
			Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK)	0 kelompok	0	0 kelompok	0	25 kelompok	0	25 kelompok	0	100	0	25 kelompok	0	0	0	
	2.14.04. 2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri (Bidang KKK)	47 kelompok	1.335.800.000,00	46 kelompok	1.513.835.510,00	47 kelompok	2.043.704.100,00	45 kelompok	0	95,74	0	91 kelompok	1.513.835.510,00	193,62	113,33	
	2.14.04. 2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PUS anggota Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bidang KKK)	0 akseptor	0	0 akseptor	0	38866 akseptor	615.950.000,00	40468 akseptor	0	104,12	0	40468 akseptor	0	0	0	
			Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK)	0 kelompok	0	0 kelompok	0	25 kelompok	0	25 kelompok	0	100	0	25 kelompok	0	0	0	
	2.14.04. 2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK)	38866 akseptor	5.128.795.000,00	40550 akseptor	3.830.098.050,00	38866 akseptor	19.697.500,00	40468 akseptor	0	104,12	0	81018 akseptor	3.830.098.050,00	208,45	74,68	
	2.14.04. 2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK)	25 kelompok	4.044.764.000,00	23 kelompok	2.632.908.450,00	25 kelompok	98.537.900,00	25 kelompok	59.631.200,00	100	60,52	48 kelompok	2.692.539.650,00	192	66,57	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												52,95	11,62			0	92,56	
Predikat Kinerja Program Total												R	SR			SR	ST	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)												50,26	13,91			123,03	113,15	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total												SR	SR			ST	ST	

Tabel 2.1 menjelaskan bahwa capaian kinerja program/kegiatan hingga Tahun 2021 Triwulan II (aplikasi e-Monev) diukur berdasarkan target akhir tahun, yang didasarkan pada target Rencana Kerja Tahun 2021.

Terdapat beberapa capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021 yang sudah mencapai 50,00% atau lebih dari target tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk (indikator Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan: Target = 100,00%; Realisasi = 50,00%; Capaian = 50,00%).
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (indikator kesatu Persentase Peserta KB MKJP: Target = 40,00%; Realisasi = 31,87%; Capaian = 79,68%; indikator kedua Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR): Target = 100,00%; Realisasi = 130,92%; Capaian = 130,92%).
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - 1) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (indikator Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik (Bidang PP): Target = 305 orang; Realisasi = 153 orang; Capaian = 50,16%).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK (indikator kesatu Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan: Target = 2 ob; Realisasi = 1 ob; Capaian = 50,00%); indikator kedua Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik (Bidang PP): 305 orang; Realisasi = 153 orang; Capaian = 50,16%).
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (indikator kesatu Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR) (Bidang KB): Target = 3.800 orang; Realisasi = 4.975 orang; Capaian = 130,92%); indikator kedua Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (DAK): Target = 12 bulan; Realisasi = 6 bulan; Capaian = 50,00%); indikator keempat Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (Bidang Dalduk): Target = 390 dokumen; Realisasi = 195 dokumen; Capaian = 50,00%); indikator ketujuh Jumlah PPKBD Aktif (Bidang PP): Target = 390

orang; Realisasi = 390 orang; Capaian = 100,00%); indikator kedelapan Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK): Target = 25 kelompok; Realisasi = 25 kelompok; Capaian = 100,00%); indikator kesembilan Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK): Target = 38.866 akseptor; Realisasi = 40.468 akseptor; Capaian = 104,12%).

- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 - 1) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (indikator kedua Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (Bidang Dalduk): Target = 390 dokumen; Realisasi = 195 dokumen; Capaian = 50,00%).
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (indikator Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai (Bidang KB): Target = 96 klinik; Realisasi = 80 klinik; Capaian = 83,33%).
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (indikator Jumlah Peserta KB Aktif (Bidang KB): Target = 343.625 akseptor; Realisasi = 391.255 akseptor; Capaian = 113,86%).
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (indikator kesatu Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai (Bidang KB): Target = 96 klinik; Realisasi = 80 klinik; Capaian = 83,33%).
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (indikator kesatu Jumlah PPKBD Aktif (Bidang PP): Target = 390 orang; Realisasi = 390 orang; Capaian = 100,00%); indikator ketiga Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri (Bidang KKK):

Target = 47 kelompok; Realisasi = 45 kelompok; Capaian = 95,74%).

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (indikator kesatu Persentase BKR Paripurna: Target = 62,26%; Realisasi = 56,6%; Capaian = 90,91%); indikator kedua Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB: Target = 88,15%; Realisasi = 83,97%; Capaian = 95,26%); indikator ketiga Persentase Kelompok UPPKS Mandiri: Target = 47,47%; Realisasi = 26,47%; Capaian = 55,76%).
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (indikator kesatu Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK): Target = 38.866 akseptor; Realisasi = 40.468 akseptor; Capaian = 104,12%); indikator kedua Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK): Target = 25 kelompok; Realisasi = 25 kelompok; Capaian = 100,00%).
 - 2) Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (indikator Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri (Bidang KKK): Target = 47 kelompok; Realisasi = 45 kelompok; Capaian = 95,74%).
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (indikator kesatu Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK): Target = 38.866 akseptor; Realisasi = 40.468 akseptor; Capaian = 104,12%); indikator kedua Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK): Target = 25 kelompok; Realisasi = 25 kelompok; Capaian = 100,00%).
 - 4) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (indikator Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK):

Target = 38.866 akseptor; Realisasi = 40.468 akseptor; Capaian = 104,12%).

- 5) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (indikator Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK): Target = 25 kelompok; Realisasi = 25 kelompok; Capaian = 100,00%).

Sedangkan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021 yang belum mencapai 50% sampai dengan Triwulan II, sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) (indikator Jumlah dokumen parameter (Bidang Dalduk): Target = 1 dokumen; Realisasi = 0 dokumen; Capaian = 0,00%).
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (indikator Jumlah dokumen mutasi keluarga (Bidang Dalduk): Target = 0 dokumen; Realisasi = 0 dokumen; Capaian = 0,00%).
 - 2) Sub Kegiatan Pemetaan Kependudukan (indikator Jumlah dokumen Pemetaan Kependudukan: Target = 64 dokumen Kampung KB; Realisasi = 0 dokumen Kampung KB; Capaian = 0,00%).
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (indikator Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (Bidang Dalduk): Target = 0 dokumen; Realisasi = 0 dokumen; Capaian = 0,00%).
 - 4) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (indikator kesatu Jumlah dokumen PUS Risti (CONTRA WAR) (Bidang Dalduk): Target = 0 dokumen; Realisasi = 0 dokumen; Capaian = 0,00%); indikator kedua Jumlah dokumen Surveilans

Keluarga Sejahtera (SKS) (Bidang Dalduk): Target = 0 dokumen; Realisasi = 0 dokumen; Capaian = 0,00%).

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (indikator ketiga Persentase PPKBD Mandiri: Target = 69,49%; Realisasi = 34,62%; Capaian = 49,82%).
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP (indikator ketiga Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat): Target = 115 buku; Realisasi = 49 buku; Capaian = 42,61%); indikator keempat Jumlah alat tulis kantor yang disediakan: Target = 7 jenis; Realisasi = 0 jenis; Capaian = 0,00%).
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBP (indikator ketiga Jumlah dokumen mutasi keluarga (Bidang Dalduk): Target = 1 dokumen; Realisasi = 0 dokumen; Capaian = 0,00%); indikator kelima Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP): Target = 271 orang; Realisasi = 135 orang; Capaian = 49,82%); indikator keenam Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos: Target = 0 tahun; Realisasi = 0 tahun; Capaian = 0,00%).
 - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 1) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (indikator kesatu Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP): Target = 271 orang; Realisasi = 135 orang; Capaian = 49,82%).
 - c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (indikator kedua Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (DAK) (jenis): Target = 31 gedung; Realisasi = 0 gedung; Capaian = 0,00%).
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (indikator Jumlah Unmetneed (pasangan usia

subur yang belum terlayani KB) (Bidang KB): Target = 34.181 PUS; Realisasi = 57.769 PUS; Capaian = 30,99%).

- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 1) Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (indikator Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos: Target = 1 tahun; Realisasi = 0 tahun; Capaian = 0,00%).
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (indikator kedua Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP): Target = 271 orang; Realisasi = 135 orang; Capaian = 49,82%).

Memasuki triwulan ketiga, Pemerintah Kabupaten Malang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar pada seluruh aktivitas masyarakat. Begitupun yang terjadi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana sebagian besar kegiatan tidak dapat dilakukan dikarenakan kegiatan pada Dinas banyak terkait dengan pengumpulan massa.

Namun untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan pada Tahun 2021, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan keempat dengan tetap menerapkan Prosedur Kesehatan yang ketat disetiap kegiatan.

Berdasarkan pada indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak terpenuhi tersebut di atas, dapat berdampak pada:

1. Kurang akuratnya data kependudukan yang ada, dikarenakan kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat terlaksana dengan optimal. Dimana kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan diakibatkan adanya refocusing anggaran.
2. Kurang tersosialisasinya Program Bangga Kencana dikarenakan tertundanya kegiatan.

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program BAngga Kencana, dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait Kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi.

Sebagai tindak lanjut untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya-upaya, sebagai berikut:

1. Melakukan strategi dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan data kependudukan melalui *virtual meeting*, sehingga data pelaporan kependudukan dapat diolah secara maksimal.
2. Melakukan percepatan kegiatan Program Bangga Kencana pada triwulan keempat. Sehingga target kinerja dapat terpenuhi di akhir tahun 2021.
3. Melakukan kegiatan komunikasi, edukasi, advokasi, serta sosialisasi yang lebih intens dan berkualitas, guna memberikan pengetahuan terkait Program Bangga Kencana kepada masyarakat Kabupaten Malang.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, sehingga berdasarkan analisa perkiraan capaian indikator kinerja program/kegiatan masih belum sesuai dengan harapan target Renstra. Namun, optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan harus ditingkatkan, dengan harapan agar target capaian pada tahun-tahun sebelumnya juga bisa terpenuhi pada tahun berjalan.

Untuk perhitungan capaian indikator kinerja didasarkan pada hasil perbandingan realisasi capaian program kegiatan terhadap target program / kegiatan Renja Tahun 2021. Metode perhitungan pada realisasi capaian program kegiatan, didasarkan pada hasil penjumlahan realisasi capaian awal masa berlakunya Renstra (Tahun 2016) hingga tahun berjalan 2021 (perkiraan capaian), hal ini dikarenakan semua indikator tidak mengalami perubahan (sama).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, didasarkan pada prioritas kebutuhan yang dialokasikan secara proporsional pada setiap program/kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp.7.013.544.484,00 (30,43%).

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.60.098.000,00 (0,26%).
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.60.098.000,00 (0,26%).
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp.6.339.423.354,00 (27,51%).
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.4.261.625.254,00 (18,49%);
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.2.074.641.100,00 (9,00%);
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp.3.157.000,00 (0,01%);
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp.0,00 (0,00%).
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp.95.016.000,00 (0,41%).
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp.32.016.000,00 (0,14%);
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp.63.000.000,00 (0,27%).
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.320.289.130,00 (1,39 %).
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.5.895.000,00 (0,03%);
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.240.247.130,00 (1,04%);
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.15.860.000,00 (0,07%);

- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp.560.000,00 (0,01%);
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu Rp.19.845.000,00 (0,09%);
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.37.882.000,00 (0,16%).
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.17.262.000,00 (0,07%).
- 1) Pengadaan Mebel Rp.17.262.000,00 (0,07%);
 - 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.0,00 (0,00%).
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.13.200.000,00 (0,06%).
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.9.000.000,00 (0,04%);
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.4.200.000,00 (0,02%).
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.168.256.000,00 (0,73%).
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.155.730.000,00 (0,68%);
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp.12.526.000,00 (0,05%).

2. Program Pengendalian Penduduk Rp.763.936.700,00 (3,32%).

- b. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Rp.169.090.200,00 (0,73%).
- 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Rp.169.090.200,00 (0,73%).
- c. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp.594.846.500,00 (2,58%)
- 1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Rp.0,00 (0,00%);
 - 2) Pemetaan Kependudukan Rp.594.846.500,00 (2,58%);
 - 3) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Rp.0,00 (0,00%);
 - 4) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp.0,00 (0,00%).

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp.12.207.297.400,00 (52,98%).

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Rp.2.662.968.000,00 (11,56%).
 - 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Rp.12.654.000,00 (0,05%);
 - 2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Rp.301.002.000,00 (1,31%);
 - 3) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Rp.2.349.312.000,00 (10,20%).
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Rp.2.006.805.000,00 (8,71%).
 - 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Rp.2.006.805.000,00 (8,71%).
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Rp.4.160.718.400,00 (18,06%).
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp.247.522.000,00 (1,07%);
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rp.2.639.311.200,00 (11,45%);
 - 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Rp.1.254.954.000,00 (5,45%);
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp.18.931.200,00 (0,08%).
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp.3.376.806.000,00 (14,65%).
 - 1) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp.1.677.200.000,00 (7,28%);
 - 2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Rp.1.699.606.000,00 (7,38%).

**4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Rp.3.057.889.500,00 (13,27%).**

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Rp.3.057.889.500,00 (13,27%).
- 1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp.280.000.000,00 (1,22%);
 - 2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp.2.043.704.100,00 (8,87%);
 - 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp.615.950.000,00 (2,67%);
 - 4) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp.19.697.500,00 (0,09%);
 - 5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Rp.98.537.900,00 (0,43%).

TABEL 3.1.
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI										
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11			
2													
2	14												
2	14	1											
2	14	1	2.01										
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	115 buku	148.443.500,00	115 buku	60.098.000,00	(88.345.500,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2	14	1	2.02										
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang terbayarkan	12 bulan	4.180.414.827,00	12 bulan	4.261.625.254,00	81.210.427,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2	14	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	80 ob	2.084.099.330,00	80 ob	2.074.641.100,00	(9.458.230,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	7 buku	8.909.970,00	7 buku	3.157.000,00	(5.752.970,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	0 buku	10.000.000,00	0 buku	-	(10.000.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	14	1	2.05										
2	14	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	157 stel	17.940.000,00	157 stel	32.016.000,00	14.076.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	14	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	150 orang	68.550.000,00	150 orang	63.000.000,00	(5.550.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11
2 14 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			421.313.500,00		320.289.130,00	(101.024.370,00)			
2 14 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	5 jenis	5.895.000,00	5 jenis	5.895.000,00		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 14 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	53 jenis	262.636.500,00	53 jenis	240.247.130,00	(22.389.370,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	6 jenis		6 jenis					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 jenis		0 jenis					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2 14 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	3 jenis	15.860.000,00	3 jenis	15.860.000,00	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 14 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1.680.000,00	1 jenis	560.000,00	(1.120.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 14 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	385 hok	25.795.000,00	385 hok	19.845.000,00	(5.950.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 14 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	97 hok	109.447.000,00	97 hok	37.882.000,00	(71.565.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	3 hok		3 hok					
2 14 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17.262.000,00		17.262.000,00	-			
2 14 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	2 jenis	17.262.000,00	2 jenis	17.262.000,00	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
2 14 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 gedung	-	0 gedung	-	-			
2 14 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			207.260.000,00		13.200.000,00	(194.060.000,00)			
2 14 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	4000 buah	9.000.000,00	4000 buah	9.000.000,00	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 14 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	12 bulan	198.260.000,00	12 bulan	4.200.000,00	(194.060.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
		Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (DAK)	0 bulan		0 bulan					

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11
2 14 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			338.680.000,00		168.256.000,00	(170.424.000,00)			
2 14 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	163 unit	155.730.000,00	163 unit	155.730.000,00	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 14 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (DAK)	1 gedung 0 gedung	182.950.000,00	1 gedung 0 gedung	12.526.000,00	(170.424.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			1.729.077.000,00		763.936.700,00	(965.140.300,00)			
2 14 2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			527.603.000,00		169.090.200,00	(358.512.800,00)			
2 14 2 2.01 1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen parameter (Bidang Dalduk)	1 dokumen	527.603.000,00	1 dokumen	169.090.200,00	(358.512.800,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 14 2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.201.474.000,00		594.846.500,00	(606.627.500,00)			
2 14 2 2.02 2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah dokumen mutasi keluarga (Bidang Dalduk)	0 dokumen	187.590.000,00	0 dokumen	-	(187.590.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2 14 2 2.02 4	Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen Pemetaan Kependudukan	64 dokumen Kampung KB	-	64 dokumen Kampung KB	594.846.500,00	594.846.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 14 2 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (Bidang Dalduk)	0 dokumen	1.000.779.400,00	0 dokumen	-	(1.000.779.400,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2 14 2 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen PUS Risti (CONTRA WAR) (Bidang Dalduk) Jumlah dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS) (Bidang Dalduk)	0 dokumen 0 dokumen	13.104.600,00	0 dokumen 0 dokumen	-	(13.104.600,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			8.722.343.800,00		12.207.297.400,00	3.484.953.600,00			
2 14 3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			407.617.800,00		2.662.968.000,00	2.255.350.200,00			
2 14 3 2.01 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik (Bidang PP)	305 orang	407.617.800,00	305 orang	12.654.000,00	(394.963.800,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI											
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11				
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	7 jenis	-	7 jenis	301.002.000,00	301.002.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
					Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	115 buku			115 buku					
					Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik (Bidang PP)	305 orang			305 orang					
					Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	2 ob			2 ob					
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (Bidang Dalduk)	390 dokumen	-	390 dokumen	2.349.312.000,00	2.349.312.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
					Jumlah dokumen mutasi keluarga (Bidang Dalduk)	1 dokumen			1 dokumen					
					Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK)	25 kelompok			25 kelompok					
					Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos	0 tahun			0 tahun					
					Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (DAK)	12 bulan			12 bulan					
					Jumlah PPKBD Aktif (Bidang PP)	390 orang			390 orang					
					Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP)	271 orang			271 orang					
					Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK)	38866 akseptor			38866 akseptor					
					Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR) (Bidang KB)	3800 orang			3800 orang					
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			2.518.781.000,00		2.006.805.000,00	(511.976.000,00)			
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (Bidang Dalduk) (Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos)	390 dokumen	2.518.781.000,00	390 dokumen	2.006.805.000,00	(511.976.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
					Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP)	271 orang			271 orang				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
													LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11
2 14 3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			5.078.002.000,00		4.160.718.400,00	(917.283.600,00)			
2 14 3 2.03 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai (Bidang KB)	96 klinik	1.287.401.000,00	96 klinik	247.522.000,00	(1.039.879.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2 14 3 2.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif (Bidang KB)	343625 akseptor	2.672.741.000,00	343625 akseptor	2.639.311.200,00	(33.429.800,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2 14 3 2.03 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (DAK) Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai (Bidang KB)	30 gedung 96 klinik	-	30 gedung 96 klinik	1.254.954.000,00	1.254.954.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2 14 3 2.03 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB) (Bidang KB) (Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR) (Bidang KB))	34181 PUS	1.117.860.000,00	34181 PUS	18.931.200,00	(1.098.928.800,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			717.943.000,00		3.376.806.000,00	2.658.863.000,00			
2 14 3 2.04 1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos (Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB) (Bidang KB))	1 tahun	25.835.000,00	1 tahun	1.677.200.000,00	1.651.365.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	
2 14 3 2.04 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri (Bidang KKK) Jumlah PPKBD Aktif (Bidang PP) Jumlah PPKBD Mandiri (Bidang PP) (Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos)	47 kelompok 390 orang 271 orang	692.108.000,00	47 kelompok 390 orang 271 orang	1.699.606.000,00	1.007.498.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11
2 14 4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.163.143.000,00		3.057.889.500,00	894.746.500,00			
2 14 4	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2.163.143.000,00		3.057.889.500,00	894.746.500,00			
2 14 4	2.01	2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK) Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK)	25 kelompok 38866 akseptor	-	25 kelompok 38866 akseptor	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
2 14 4	2.01	4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri (Bidang KKK)	47 kelompok	319.349.100,00	47 kelompok	2.043.704.100,00	1.724.355.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 14 4	2.01	6 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK) Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK)	25 kelompok 38866 akseptor	-	25 kelompok 38866 akseptor	615.950.000,00	615.950.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2 14 4	2.01	7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB (Bidang KKK)	38866 akseptor	1.117.065.500,00	38866 akseptor	19.697.500,00	(1.097.368.000,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 14 4	2.01	8 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (Bidang KKK)	25 kelompok	726.728.400,00	25 kelompok	98.537.900,00	(628.190.500,00)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Dilihat dari tabel diatas bahwa dengan adanya pembagian proporsi alokasi anggaran pada setiap program/kegiatan, diharapkan dapat menunjang pencapaian target sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diukur berdasarkan pada 3 (tiga) target indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Persentase Peserta KB Aktif	69,84%
2. Persentase Kampung KB Aktif	90,00%
3. Persentase Kelompok PIK Remaja tegar	26,04%

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan perencanaan program/kegiatan pada pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana terdapat beberapa upaya yang harus dilaksanakan, yaitu: 1) Peningkatan kualitas data kependudukan dan keluarga berencana; 2) Peningkatan kualitas data basis kependudukan dan keluarga berencana; 3) Pendewasaan Usia Perkawinan; 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana; 5) Peningkatan dan pengembangan kegiatan ketahanan keluarga dan remaja, serta pemberdayaan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pertimbangan alokasi anggaran secara proporsional dan tepat sasaran, melalui pemanfaatan sumber daya *existing* sebaik mungkin, sehingga mampu memberikan daya ungkit yang signifikan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Namun, untuk mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja pada tahun berikutnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, akan berupaya mengajukan usulan untuk peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana demi menunjang pelaksanaan setiap program/kegiatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI